

## TERBATAS

# OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM PEMANTAPAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Umum.

a. Seiring dengan perkembangan dan perubahan situasi dunia saat ini, dengan isu globalisasi seperti demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup yang dihembuskan oleh negara maju merupakan upaya intervensi terhadap negara berkembang yang mengarah kepada terjadinya kompetisi antar bangsa baik dalam lingkup global maupun regional. Implikasi dari perkembangan/perubahan tersebut memunculkan kerawanan dibidang keamanan. Apalagi bila dihadapkan dengan letak geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kondisi Ipoleksosbud Hankam negara Indonesia, maka hal tersebut dapat berkembang menjadi ancaman bagi keamanan dan keutuhan wilayah NKRI.

b. Guna menghadapi tantangan tugas TNI di masa depan yang lebih berat, maka TNI harus mampu melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Sistem pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan semesta, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan sistem pertahanan yang bersifat semesta (Sishanta)<sup>1</sup>, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pemberlakuan

/ Undang-Undang . . .

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 2 Ayat (2)

Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 membawa harapan baru bagi sistem pertahanan negara di Indonesia. Karena secara substansial undang-undang tersebut mengamanatkan kepada seluruh komponen bangsa ikut berpartisipasi aktif dalam proses mewujudkan pertahanan negara yang tangguh menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Berangkat dari permasalahan tersebut diatas dan untuk mendukung pelaksanaan pertahanan negara, maka perlu adanya upaya nyata oleh TNI melalui peningkatan kembali Pelaksanaan Komando Kewilayahan sebagai ujung tombak TNI dalam rangka mendukung dan melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

c. Didalam melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan guna membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional guna kepentingan pertahanan negara sudah berjalan, namun bila dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini perlu adanya suatu peningkatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dengan lebih mengoptimalkan keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial agar menjadi kekuatan pertahanan serta pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sarana prasarana lainnya menjadi kemampuan cadangan dan pendukung guna terwujudnya kekuatan pertahanan negara.

## 2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran bagi Komando Atas tentang Optimalisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam memantapkan Sistem Pertahanan Negara.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan bagi unsur pimpinan TNI didalam mengambil langkah-langkah guna meningkatkan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam mendukung dan memantapkan Sistem Pertahanan Negara.

/ 3. Ruang . . .

**3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Pokok bahasan tulisan ini mencakup masalah Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang dilaksanakan oleh Kowil dengan dibatasi pada pengoptimalan Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam mendukung dan memantapkan Sistem Pertahanan Negara. Adapun tulisan ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang Pemikiran.
- c. Kondisi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Saat Ini.
- d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.
- e. Kondisi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang Diharapkan.
- f. Optimalisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
- g. Penutup.

**4. Pendekatan.** Menggunakan pendekatan deskripsi analisis dan empiris untuk dapat diaplikasikan dalam upaya Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

**5. Pengertian.**

**a. Tugas Pokok TNI.** Adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

**b. Sistem Pertahanan Negara.** Adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh

/ pemerintah . . .

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 Ayat (1)

pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.<sup>3</sup>

c. **Sumber Daya Nasional.** Adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.<sup>4</sup>

d. **Pembinaan Teritorial (Ketentuan yang masih berlaku).** Adalah pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial Ipoleksosbudhankam guna mewujudkan potensi setatis menjadi kondisi yang merupakan ketahanan wilayah atau daerah yang dapat menjadi kekuatan teritorial sebagai Ruang, Alat dan Kondisi Juang. Atau segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan, serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya dalam rangka menjadikan wilayah sebagai Ruang, Alat dan Kondisi Juang guna kepentingan Hankamneg<sup>5</sup>.

e. **RAK Juang.** Adalah wilayah dengan segenap isinya yang telah siap siagakan, sebagai sarana perjuangan bangsa yang kokoh, kuat, dan tidak mengenal menyerah untuk berperan serta dalam penghancuran kekuatan musuh dalam wadah Sishankamrata<sup>6</sup>.

f. **Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.** Adalah tugas yang harus dilaksanakn oleh TNI AD sebagai sarana dan metode guna mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat untuk mendukung keberhasilan tugas pokok memberdayakan NKRI.<sup>7</sup>

/ BAB II . . .

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>4</sup> Ibid. Pasal 1 Ayat (8)

<sup>5</sup> Skep Kasad, Nomor :Skep/5055/XI/1988 tanggal 5 Nopember 1998, Buku Induk tentang Pembinaan Teritorial

<sup>6</sup> Naskah Departemen, Nomor : 52-07-B1-C.1102, Lampiran A pada Rendal Binter, Halaman-2.

<sup>7</sup> UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

**BAB II**

**LATAR BELAKANG PEMIKIRAN**

**6. Umum.**

a. Bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah banyak mengalami hambatan, tantangan maupun gangguan. Namun, dengan kegigihan seluruh komponen bangsa Indonesia maka segala bentuk hambatan, tantangan maupun gangguan dapat diatasi, hal ini merupakan hasil usaha bangsa Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara lain.

b. Dari pengalaman tersebut merupakan bukti kesungguhan dan kemandirian bangsa Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu adanya upaya peningkatan perjuangan untuk mewujudkan kekuatan dan mempertahankan keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kemungkinan datangnya ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

c. Agar pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam pengelolaan bidang geografi, demografi dan kondisi sosial dalam pelaksanaannya menggunakan metode pengumpulan data yang akurat, sosialisasi Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan, melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait sehingga pengoptimalan Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan dapat terwujud.

**7. Landasan Pemikiran.**

a. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai landasan idiil seluruh bangsa Indonesia diyakini sebagai alat pemersatu bangsa, walaupun

/ Pancasila ...

Pancasila telah berulang kali mengalami berbagai ancaman terutama dari pihak-pihak yang ingin merubah dan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, namun sampai dengan saat ini Pancasila telah diyakini kebenarannya dalam sejarah perjuangan bangsa dalam mengejar dan mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan strategi penangkalan yang bersumber pada falsafah Pancasila guna menghadapi setiap kemungkinan ancaman yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, perlu pembinaan komponen cadangan dan pendukung secara terpadu guna kepentingan pertahanan negara.

**b. Landasan Konstitusional.** UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mempunyai kekuatan hukum terutama yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang memuat cita-cita nasional serta perwujudan bela negara bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian dapat dijadikan landasan yang kuat sebagai cita-cita bangsa Indonesia kedepan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>8</sup> serta dapat dijadikan pedoman dalam rangka bela negara seperti yang tercantum pada pasal 30 UUD 1945 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara.

**c. Landasan Visioner.** Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang bersumber pada falsafah hidup bangsa tentang jati diri dan lingkungannya yang bernilai strategis, cara pandang tersebut secara utuh bahwa wilayah Indonesia dan

/ segala ...

---

<sup>8</sup> Pembukaan UUD 1945

segala isinya sangat berpengaruh terhadap penerapan sistem pertahanan negara dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yang melibatkan seluruh warga negara serta seluruh sumber daya nasional lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu metode bagaimana meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan wujud kesadaran dan kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam tata laku bangsa Indonesia itu sendiri baik secara batiniah maupun lahiriah.

**d. Landasan Historis.** Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisikan keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan, tantangan, ancaman serta gangguan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Perpaduan kemampuan dan kekuatan nasional tersebut perlu diberdayakan dalam kerangka sistem pertahanan negara dengan menyiapkan komponen cadangan dan pendukung, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pembinaan secara terencana dan terpadu guna kepentingan ketahanan nasional.

**e. Landasan Yuridis.**

1) Undang - Undang RI Nomor. 3 Tahun 2002 tentang Haneg. Didalam undang-undnag RI No. 3 tahun 2002 pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta

/ dipersiapkan ...

## TERBATAS

8

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan di selenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman<sup>9</sup>. Sehingga dalam penerapannya perlu pemberdayaan segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI dinyatakan pada pasal 7 ayat (1) tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>10</sup> Maka sesuai dengan penjelasan pada pasal 7 adalah membantu pemerintah menyiapkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dikaitkan dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil merupakan hal yang sangat rawan terhadap kemungkinan ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dalam Konteks ini maka bila dihubungkan dengan sistem pertahanan negara perlu memberdayakan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya agar mampu menagkal setiap ancaman yang mungkin timbul.

/ 3) Undang ...

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (2)

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1)

3) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, antara lain menyatakan bahwa bidang pertahanan keamanan adalah wewenang pemerintah pusat, namun dalam penyiapan sumber daya nasional yang tersedia untuk ditransformasikan ke dalam sumber daya pertahanan negara, pemerintah daerah turut menyiapkan secara terpadu dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Oleh karena itu pembinaan dan perkembangan kekuatan pertahanan negara harus terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah agar dalam pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dapat seiring dan sejalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Doktrin TNI. Penggunaan kekuatan merupakan perwujudan tampilan TNI sebagai komponen kekuatan TNI, didasarkan pada spektrum ancaman dan gangguan serta permintaan bantuan dari pihak yang berwenang. Hal ini menuntut kehadiran penugasan TNI harus dilandasi oleh legitimasi politik dan payung hukum. Sistem penggunaan kekuatan kemudian dituangkan dalam wujud postur TNI yang merupakan keterpaduan pengerahan kekuatan, kemampuan dan gelar pasukan dilapangan, sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing yang diproyeksikan melalui pola operasi militer untuk perang dan pola operasi militer selain perang. Pemberian bantuan sesuai permintaan diatur dalam perundang-undangan.

**8. Dasar Pemikiran.** Memperhatikan situasi saat ini dalam memantapkan sistem pertahanan negara masih terdapat kelemahan dan kekurangan terutama mengenai pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

/ Demikian ...

Demikian juga dengan kurang mantapnya sistem pertahanan negara terutama dalam penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung serta kurang dipahaminya Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya guna meningkatkan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam pemantapan sistem pertahanan negara, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan menginventarisir kekurangan-kekurangan tersebut diatas agar dapat dijadikan acuan dan pedoman guna perbaikan kedepan, mensosialisasikan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dengan langkah tersebut diharapkan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan akan dapat memantapkan sistem pertahanan negara.

**BAB III**

**KONDISI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN SAAT INI**

**9. Umum.** Secara umum kondisi Kowil saat ini masih belum mampu memberikan kontribusi dalam pemantapan Sishanneg sesuai dengan UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan pencapaian sasaran tugas baik secara kuantitas maupun kualitas. Dikaitkan dengan adanya perubahan istilah dari Pembinaan Teritorial menjadi pemberdayaan wilayah pertahanan maka dapat menimbulkan kerancuan bagi personel Kowil dalam melaksanakan tugasnya. Guna mendukung Sistem Pertahanan Negara maka Komando Kewilayahan harus mampu melaksanakan fungsinya secara optimal, sehingga akan memudahkan bagi Komando Kewilayahan dalam mengambil langkah-langkah pemecahannya.

**10. Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.** Dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara terutama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Komando Kewilayahan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. TNI melalui Komando Kewilayahan telah melakukan pembenahan terhadap berbagai kelemahan, khususnya implementasi Pelaksanaan Komando Kewilayahan sesuai UU No 3 tahun 2002, namun secara keseluruhan pelaksanaan tersebut saat ini masih dinilai belum maksimal.

**a. Kondisi RAK Juang.** Komando Kewilayahan didalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan masih mengalami banyak kendala dan hambatan terutama dalam pembinaan pemberdayaan bidang geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam.

/ 1) Geografi . . .

## TERBATAS

12

1) Geografi. Ditinjau dari kondisi geografi wilayah NKRI yang sangat luas sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan pembinaan disebabkan jumlah personel Kowil yang ada belum cukup bila dihadapkan dengan wilayah tanggung jawabnya yang sangat luas sehingga mengakibatkan kesiapan wilayah pertahanan masih belum terwujud dengan baik.

2) Demografi. Jumlah penduduk Indonesia yang besar yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya yang berbeda mengakibatkan rentan terhadap kerawanan yang berbau SARA sehingga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

3) Sumber Daya Alam. Keberadaan sumber daya alam yang dapat disiapkan dan diberdayakan dalam rangka pertahanan negara baik ditinjau dari aspek penyiapan, pemeliharaan maupun penggunaan belum dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat mengakibatkan kecemburuan antar daerah yang relatif kaya dengan daerah yang sumber daya alamnya minim.

4) Ideologi. Dibidang ideologi masih terdapat ideologi lain selain Pancasila yang berusaha merongrong serta merubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka anut baik yang berhaluan kiri maupun kanan sehingga dapat berpengaruh terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dapat menjadi benturan kepentingan golongan dari partai politik.

5) Politik. Kesadaran berpolitik masyarakat masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan para elit politik yang cenderung mementingkan kelompok dan pribadinya serta cenderung dalam menyampaikan aspirasi politiknya bersifat kedaerahan sehingga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

/ 6) Ekonomi . . .

TERBATAS

## TERBATAS

13

6) Ekonomi. Situasi ekonomi masih diwarnai berbagai masalah akibat dari keterpurukan dibidang ekonomi serta merebaknya budaya KKN yang dapat memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7) Sosial Budaya. Dampak dari era globalisasi dengan kemajuan dibidang teknologi dan komunikasi dapat memberikan peluang masuknya budaya asing yang langsung diserap oleh generasi muda sehingga berakibat terhadap memudarnya budaya nasional.

8) Hankam. Gangguan keamanan dari dalam negeri berupa pemberontakan bersenjata, ancaman kerusuhan dan kekerasan seperti aksi massa yang anarkhis, perkelahian antar etnis, kerusuhan akibat pilkada, gangguan terorisme dapat menimbulkan stabilitas keamanan yang kurang kondusif

**b. Permasalahan.** Aspek yang menjadi kendala dalam pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan antara lain adalah :

1) Bidang Personel.

a) Kuantitas. Apabila ditinjau dari segi kuantitas Personel Komando Kewilayahan maka kelemahan yang mendasar adalah ketidak seimbangan antara personel yang masuk Komando Kewilayahan dan pemisahan mengakibatkan jumlah personel belum sesuai dengan DSPP, terutama kekurangan Perwira Pertama dan Tamtama serta PNS. Disisi lain terjadi kelebihan pada Bintara sehingga didalam melaksanakan tugas belum maksimal. Demikian juga

/ dengan . . .

TERBATAS

## TERBATAS

14

dengan perimbangan antara penambahan personel dan pemisahan terutama personel yang memasuki usia pensiun sehingga terjadi penyusutan.

b) Kualitas. Pada umumnya Personel Komando Kewilayahan terutama Bintara dan Tamtama mempunyai bekal pendidikan yang minim, bila dihadapkan dengan tugas dan tanggung jawab yang dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi baik sekarang maupun yang akan datang. Demikian juga dengan masih terbatasnya jumlah Personel Teritorial yang memiliki spesialisasi Teritorial seperti Susbater, Suspater serta masih banyak yang belum berpengalaman tugas di Komando Kewilayahan sehingga belum mewisadahi kebutuhan untuk tugas yang dihadapi.

2) Motivasi Kerja. Dorongan serta hasrat kemauan prajurit untuk menumbuhkan semangat kerja sangat diperlukan guna mendukung kelancaran operasional dilapangan, namun kenyataan yang dihadapi saat ini masih banyak ditemukan Personel Komando Kewilayahan yang memiliki motivasi kerja dan semangat kerja yang rendah baik dilihat dari aktivitas kegiatan sehari-hari dari segi penampilan, sikap, tingkah laku serta disiplin maupun dari hasil kerja sehari-hari demikian juga dengan masih tingginya berbagai macam pelanggaran mulai dari pelanggaran disiplin sampai pelanggaran yang bersifat kriminal. Sehingga dari kondisi yang demikian merupakan cermin dari motivasi kerja Aparat Komando Kewilayahan yang masih rendah, sehingga sangat berpengaruh bagi upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

/ 3) Komunikasi . . .

TERBATAS

3) Komunikasi Sosial. Kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara aparat Komando Kewilayahan dengan masyarakat, karena masih banyak dijumpai di lapangan bahwa aparat Komando Kewilayahan yang bertugas di wilayahnya belum mampu dan belum mempunyai keberanian untuk tampil dalam menyampaikan pendapat terutama dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi sehingga timbul keraguan dalam mengambil keputusan.

4) Kesejahteraan Prajurit. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit sehingga sangat berpengaruh terhadap rendahnya kinerja dan motivasi kerja sebagian besar aparat Komando Kewilayahan di wilayah.

**11. Sistem Pertahanan Negara.** Kegiatan Komando Kewilayahan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal khususnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk ikut terlibat dalam Sistem Pertahanan Negara. Hal ini dapat ditinjau dari :

a. Belum terdapatnya semua potensi wilayah yang berkaitan dengan Sistem Pertahanan Negara. Hal ini dapat diketahui bahwa disebagian besar Komando Kewilayahan yang ada tidak memiliki data aktual dan lengkap tentang kondisi terakhir potensi wilayah yang ada.

b. Masyarakat belum memiliki kesadaran bela negara, hal tersebut diakibatkan sampai saat ini masyarakat secara umum masih belum mengetahui mengenai UU No. 3 tahun 2002 tentang Hanneq. Sehingga belum terlihat keterlibatan masyarakat sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dalam aspek Pertahanan Negara. Karena sosialisasi UU No. 3 tahun 2002 belum atau jarang sekali dilaksanakan.

/ c. TNI . . .

c. TNI sebagai komponen utama. Sebagai komponen Hanneg TNI khususnya Kowil di mana menurunnya citra Kowil diakibatkan oleh kondisi masa lalu melaksanakan politik praktis sehingga menonjolkan fungsi sospolnya dibandingkan fungsi hankamnya, akibatnya citra Kowil cenderung menurun. Hal ini dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembubaran Kowil. Sampai saat ini masih sering muncul isu-isu yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan agar Kowil dibubarkan.
  
- 2) Berpolitik praktis. Keberadaan Komando Kewilayahan dan kaitannya dengan penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam mewujudkan pertahanan negara masih terus digugat oleh kelompok tertentu dalam masyarakat dan masih timbul kekhawatiran tentang militerisme dan keberadaan Kowil sebagai sarana politik praktis TNI.

**BAB IV**

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

**12. Umum.** Berdasarkan kondisi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sebagaimana yang diuraikan diatas, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dimana faktor-faktor tersebut bisa berasal dari luar (*eksternal*) maupun dari dalam (*internal*), sehingga dengan demikian dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengoptimalkan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam pemantapan sistem pertahanan negara sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

**13. Faktor Internal.**

**a. Kekuatan.**

1) Tugas pokok TNI sudah jelas dan tegas seperti tertuang dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, hal ini dapat dimengerti oleh seluruh personel Kowil yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap Personel Komando Kewilayahan dalam memberdayakan wilayah pertahanan dalam rangka membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan guna mewujudkan sistem pertahanan negara

2) Loyalitas dan dedikasi yang dimiliki oleh Personel Komando Kewilayahan dapat menjadi kekuatan untuk memberdayakan potensi wilayah guna kepentingan pertahanan negara dan masih banyak hal yang dapat diberdayakan bagi peningkatan profesional prajurit.

3) Sumber Daya Nasional merupakan modal dasar bagi pemberdayaan kekuatan pertahanan wilayah apabila dikelola dan disiapkan dimana sebagian masyarakat dapat menjadi komponen utama (TNI), komponen cadangan serta komponen pendukung.

/ 4) Pengalaman ...

4) Pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan sebagai ciri dari bangsa pejuang telah mendorong generasi muda untuk memelihara semangat patriotisme dan rasa nasionalisme agar tetap tegaknya NKRI.

**b. Kelemahan.**

1) Sumber Daya Manusia (SDM).

a) Kondisi Personel. Sebagian Personel yang bertugas di Komando Kewilayahan memiliki kemampuan pengetahuan teritorial dibawah rata-rata bila dihadapkan dengan tantangan tugas dilapangan sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembinaan wilayah yang menjadi tanggung jawab Satuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

(1) Personel Komando Kewilayahan yang dipindahkan ke Komando Kewilayahan pada umumnya adalah prajurit yang belum pernah memperoleh pengetahuan tentang pembinaan teritorial, prajurit yang sudah tua dan memiliki stakes-III serta kadangkala mempunyai masalah di satuan lama.

(2) Kendala Personel Komando Kewilayahan khususnya para Babinsa tidak mampu mengimbangi tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, sehingga dapat menjadi kendala dalam tugas dilapangan.

/ b) Kualitas . . .

## TERBATAS

19

b) Kualitas Personel. Secara umum kualitas Personel yang ada di Komando Kewilayahan masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu peningkatan kemampuan terutama dibidang kemiliteran maupun komunikasi sosial, tingkat latihan dan pendidikan masih terbatas sehingga kualitas prajurit Kowil cukup memprihatinkan.

2) Kondisi sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana yang sangat terbatas yang ada di Komando Kewilayahan seperti terbatasnya piranti lunak, pangkalan yang kurang memadai, sarana transportasi dan komunikasi serta tingkat latihan personel Kowil masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

3) Metode Binter. Metode Binter yang meliputi Bhakti TNI, Pembinaan Pertahanan Wilayah dan Komunikasi Sosial belum dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Binter diperlukan suatu metode Binter yang dapat menyentuh dan mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam pembelaan negara.

### 14. Faktor Eksternal.

#### a. Peluang.

1) Pengamalan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila dan UUD 1945 memberikan pengaruh positif pada kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara semakin tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat dijadikan dasar kekuatan ideologi bangsa Indonesia untuk menghadapi setiap ancaman yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar

/ negeri . . .

TERBATAS

negeri dan dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

2) Potensi sumber daya alam dan buatan serta potensi sumber daya manusia merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan pertahanan negara. Apabila dikelola secara maksimal demi kepentingan pertahanan negara maka dapat menangkal setiap potensi ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

3) Perkembangan situasi dan kondisi bangsa Indonesia akibat dari keterpurukan yang dialami dimulai dari bergulirnya reformasi sampai dengan saat ini, dapat di jadikan momentum guna meningkatkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik demi kepentingan bangsa dan negara.

4) Sebagian besar masyarakat masih mempercayai TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.<sup>11</sup>

**b. Kendala.**

1) Prajurit Komando Kewilayahan. Kekurang mampuan prajurit Komando Kewilayahan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi kendala bagi satuan dalam dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan.

2) Masyarakat. Sikap masyarakat yang belum memiliki disiplin nasional, hal ini dapat dilihat dari kurang disiplinnya dalam

/ disiplin . . .

---

<sup>11</sup> UU No. 3 Tahun 2002 Bab II pasal 4, tentang Hanneq

ketaatan terhadap hukum maupun norma-norma dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang cukup dominan pada aspek ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut, situasi ekonomi masih diwarnai berbagai masalah dengan merebaknya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tak kunjung teratasi oleh Pemerintah akibatnya dapat memporak porandakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara., sehingga dari kondisi ini dapat melemahkan ketahanan nasional dibidang ekonomi.

3) Gangguan Keamanan. Gangguan keamanan dari dalam negeri berupa pemberontakan bersenjata di beberapa daerah seperti GAM, OPM dan RMS yang ingin memisahkan diri dari NKRI, kelompok radikal dan kelompok tidak puas yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka anut, ancaman kerusuhan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh golongan tertentu guna kepentingannya akibat dari kehidupan berpolitik yang kurang sehat seperti hasil Pilkada yang tidak transparan serta ancaman kriminalitas yang berlatar belakang sosial ekonomi dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa.

4) Pemahaman Otonomi Daerah. Masih terdapat pejabat Pemerintah Daerah yang belum paham tentang makna dan tujuan Otonomi Daerah, sehingga tujuan dari Otonomi Daerah untuk memperpendek urusan birokrasi malah sebaliknya semakin kabur dan menyengsarakan masyarakat, bahkan cenderung mengarah kepada primordialisme serta menjadi alat kekuasaan. Sehingga kondisi ini dapat menimbulkan berbagai pandangan negatif, apabila tidak segera ditangani secara tepat dapat menimbulkan perpecahan diantara masyarakat bahkan antar daerah.

/ 5) Tuntutan . . .

5) Tuntutan yang dilaksanakan oleh pihak yang tidak senang terhadap TNI tentang keberadaan Komando Kewilayahan agar dibubarkan, pendiskreditan TNI sebagai pelaku utama pelanggaran HAM dan keterlibatan TNI dalam setiap peristiwa yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan antipati sebagian masyarakat yang tidak senang terhadap keberadaan TNI.

**BAB - V**

**KONDISI PEMBERDAYAAN**

**WILAYAH PERTAHANAN YANG DIHARAPKAN**

**15. Umum.** Untuk mendukung sistem pertahanan negara agar terlaksana sesuai dengan arah dan sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya tolok ukur bagaimana seharusnya pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan. Untuk itu perlu adanya batasan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mendukung pemantapan sistem pertahanan negara. Kondisi yang diharapkan dapat digambarkan seperti uraian dibawah ini.

**16. Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.** Kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan dalam rangka membina seluruh potensi wilayah yang meliputi potensi geografi, demografi maupun sumber daya alam dan buatan agar dapat menjadi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh. Pencapaian kondisi tersebut harus dapat dilaksanakan secara maksimal.

**a. Terwujudnya RAK Juang yang Tangguh.** Komando Kewilayahan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan diharapkan dapat menyiapkan keadaan geografi, demografi, sumberdaya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam sehingga dapat mewujudkan RAK Juang yang tangguh guna kepentingan pertahanan negara sesuai dengan UU No. 3 tahun 2002 tentang Hanneg.

1) Geografi. Agar kondisi geografi dapat di bina dengan baik maka Komando Kewilayahan harus dapat melaksanakan pembinaan secara maksimal walaupun dari segi jumlah personel Kowil yang terbatas diharapkan pembinaan bidang geografi terus ditingkatkan melalui kegiatan Bhakti TNI sehingga wilayah tersebut dapat dijadikan wilayah pertahanan untuk kebutuhan pertahanan negara.

/ 2) Demografi . . .

2) Demografi. Pembinaan dibidang demografi adalah untuk membina masyarakat agar menjadi komponen cadangan dan pendukung yang siap dimobilisasi guna kepentingan pertahanan negara dengan meningkatkan pembinaan komunikasi sosial diharapkan timbul kesadaran masyarakat dalam meningkatkan bela negara.

3) Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam diharapkan dapat disiapkan dan diberdayakan dalam rangka pertahanan negara baik ditinjau dari aspek penyiapan, pemeliharaan maupun penggunaan agar dilaksanakan secara maksimal guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

6) Ideologi. Dengan memantapkan kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila dengan melakukan komunikasi sosial diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menangkal pengaruh ideologi lain yang dapat berpengaruh terhadap keutuhan bangsa dan negara.

7) Politik. Pembinaan dibidang politik diharapkan dapat mengajak masyarakat agar melaksanakan kegiatan politik secara sehat guna kepentingan bangsa dan negara.

6) Ekonomi. Dengan melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat dalam mewujudkan perekonomian secara mandiri dan dapat mengatasi gejala sosial ekonomi akibat dari keterpurukan ekonomi.

7) Sosial Budaya. Dengan melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah dan kegiatan komunikasi sosial diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menangkal masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

/ 8) Hankam . . .

8) Hankam. Diharapkan dengan melaksanakan Bhakti TNI dan komunikasi sosial dapat meningkatkan kesadaran bela negara untuk meningkatkan perlawanan rakyat terhadap setiap ancaman yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.

**b. Kondisi yang Diharapkan.** Agar aspek yang menjadi kendala dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dapat ditingkatkan oleh Komando Kewilayahan adalah :

1) Bidang Personel.

a) Secara kuantitas. Personel Komando Kewilayahan dihadapkan dengan kondisi ketidak seimbangan antara penambahan personel dan pemisahan yang berakibat kepada jumlah personel belum sesuai dengan DSPP maka kekurangan tersebut harus dipenuhi, diharapkan dengan pemenuhan DSPP, Komando Kewilayahan dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

b) Secara kualitas. Dengan keterbatasan Personel Komando Kewilayahan yang memiliki kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan yang berakibat tidak mampu menjawab tantangan tugas, untuk memenuhi keterbatasan tersebut maka Personel Komando Kewilayahan harus dibekali dengan pendidikan dan latihan seperti Susbater, Suspater maupun pembekalan bidang teritorial dengan harapan melalui pendidikan dan latihan serta pembekalan teritorial tersebut akan mampu melakukan tugas-tugas pemberdayaan wilayah pertahanan dalam menyiapkan ketahanan wilayah dengan sistem pertahanan rakyat semesta.

/ 2) Motivasi . . .

## TERBATAS

26

2) Motivasi Kerja. Untuk menumbuhkan motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi bagi Personel Komando Kewilayahan perlu upaya yang harus dilakukan secara intensif dan konsisten oleh setiap Komandan Satuan dengan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap setiap aktivitas kegiatan, disiplin dan tingkah laku sehari-hari dengan harapan tumbuh motivasi kerja guna mendukung kelancaran operasional dilapangan.

3) Komunikasi Sosial. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan khususnya dalam menjalin komunikasi yang baik antara Personel Komando Kewilayahan dengan seluruh komponen masyarakat harus mendapat pelatihan tehnik berkomunikasi dengan baik, pelatihan tersebut dilaksanakan secara terprogram dalam bentuk latihan dalam satuan karena modal utama dalam melaksanakan Binter adalah dengan kemampuan komunikasi sosial.

4) Kesejahteraan Prajurit. Kesiapan tugas Personel Komando Kewilayahan dapat diukur dari kesiapan moril karena terkait dengan kesejahteraan Personel Komando Kewilayahan itu sendiri, sehingga untuk menghasilkan prajurit yang mampu bertugas dengan baik maka harus diupayakan bagaimana seorang Personel Komando Kewilayahan itu memiliki kondisi kesejahteraan yang memadai.

**17. Sistem Pertahanan Negara.** Untuk mendukung Komando Kewilayahan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan harus dapat dilaksanakan secara maksimal terutama bagaimana memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam Sistem Pertahanan Semesta antara lain :

a. Dari permasalahan yang ada dalam memantapkan Sistem Pertahanan Negara diharapkan terdatanya semua potensi wilayah secara

/ baik . . .

TERBATAS

baik dengan pendataan yang akurat. Sehingga dari data tersebut dapat dijadikan bahan dalam pembuatan analisa potensi wilayah, demikian juga dari data yang ada dapat dimanfaatkan guna kepentingan analisa potensi pertahanan.

b. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya sistem pertahanan negara, diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Sehingga dari tumbuhnya rasa nasionalisme akan memperkuat ketahanan nasional yang dapat menangkal setiap ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

c. TNI sebagai komponen utama diharapkan tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terpengaruh untuk melakukan politik praktis dan tidak berbisnis sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Sehingga dapat terwujud postur TNI yang profesional, efektif, efisien dan modern yang dilandasi dengan jati diri prajurit sebagai Tentara Pejuang, Tentara Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia.

**BAB - VI**

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN  
DALAM PEMANTAPAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA**

**18. Umum.** Pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan dalam rangka mewujudkan pertahanan negara pada hakekatnya adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar terwujud kemanunggalan TNI - Rakyat, terwujudnya kesadaran berbangsa dan bernegara, berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara serta cinta tanah air. Komando Kewilayahan sebagai pembina wilayah dalam pelaksanaannya menggunakan seluruh potensi nasional yang tersedia secara total dan integral dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Oleh karena itu perlu suatu upaya pemberdayaan wilayah pertahanan dalam mewujudkan pertahanan negara dengan menentukan langkah serta upaya yang diambil dengan memperhatikan perkembangan lingkungan saat ini.

**19. Tujuan.** Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan memelihara integritas nasional.

**20. Sasaran.** Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam memantapkan sistem pertahanan negara dalam rangka pertahanan negara meliputi :

a. Komando Kewilayahan dalam melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan harus maksimal agar dapat memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam sistem pertahanan negara.

/ b. Teraktualisasikannya . . .

b. Teraktualisasikannya UU No.3 tahun 2002 tentang Hanneg dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya sistem pertahanan negara.

c. Terbentuknya suatu kelembagaan formal yang mampu menyelenggarakan fungsi pertahanan secara terkoordinasi antar komponen Hanneg diwilayah.

**21. Subyek.** Sesuai dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, maka subyek dalam rangka implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam memantapkan sistem pertahanan negara yang terdiri dari Panglima TNI dan Komandan Komando Kewilayahan serta yang terkait dengan bidang pertahanan negara yang keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**22. Obyek.** Dalam melaksanakan optimalisasi pemberdayaan wilayah pertahanan disuatu wilayah melibatkan semua personel yang berada di jajaran Komando Kewilayahan sebagai obyek serta komponen bangsa yang terkait, sehingga terwujud mantapnya sistem pertahanan negara.

**23. Metode.** Metode yang digunakan dalam rangka implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam memantapkan sistem pertahanan negara dapat dilakukan melalui :

a. Inventarisasi. Merupakan proses pengumpulan data-data mengenai seluruh potensi wilayah secara baik serta dengan pendataan yang akurat sehingga potensi wilayah tersebut dapat didayagunakan dalam sistem pertahanan negara.

b. Sosialisasi. Adalah segala upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh individu atau kelompok masyarakat. Sosialisasi dapat juga dilakukan melalui berbagai sarana diantaranya melalui media cetak, media elektronik, forum seminar,

/ lokakarya . . .

lokakarya , dan pertemuan antara pimpinan TNI AD dengan instansi terkait beserta seluruh komponen bangsa lainnya.

c. **Edukasi.** Merupakan usaha, pekerjaan, perbuatan, kegiatan maupun proses dalam rangka meningkatkan kemampuan seseorang melalui pengajaran dan pelatihan agar menambah pengetahuan, kemahiran dan kecakapan serta ketrampilan untuk melakukan sesuatu baik secara individu atau kelompok masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

d. **Kerjasama.** Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai berupa mantapnya sistem pertahanan semesta diperlukan kerja sama yang maksimal antara TNI dengan seluruh komponen bangsa lainnya untuk mencegah timbulnya pertentangan dan perselisihan. Kerja sama dapat dilakukan dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **24. Sarana dan Prasarana.**

##### **a. Sarana.**

- 1) Media massa baik cetak maupun elektronik.
- 2) Tatap muka, ceramah, seminar dan diskusi.
- 3) Pelatihan pendidikan pendahuluan bela negara.
- 4) Organisasi kemasyarakatan.

##### **b. Prasarana.**

- 1) Lingkungan masyarakat meliputi lingkungan masyarakat umum, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan.
- 2) Instansi pemerintah daerah.
- 3) Instansi . . .

- 3) Instansi satuan TNI yang berada diwilayah.
- 4) Lembaga pendidikan umum dan militer yang berada diwilayah.

**25. Upaya.** Guna tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan oleh Komando Kewilayahan dalam memantapkan sistem pertahanan negara sesuai UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Hanneg. Penjabaran pelaksanaan ini harus mampu membangun persepsi dan penilaian masyarakat terhadap personel Komando Kewilayahan dalam rangka membina potensi wilayah yang meliputi bidang geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam menjadi kekuatan komponen utama , komponen cadangan dan komponen pendukung guna terciptanya pertahanan negara yang kokoh. Pelaksanaan pemberdayaan wilayah ini dapat terwujud apabila didukung dengan ketersediaan dari SDM personel Komando Kewilayahan yang profesional, dapat dicapai melalui :

**a. Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.**

Memantapkan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan dalam rangka membina seluruh potensi wilayah secara maksimal sehingga dapat memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam sistem pertahanan negara yang berorientasi kepada kondisi wilayah.

- 1) Terwujudnya RAK Juang yang tangguh. Dalam memantapkan sistem pertahanan negara adalah memberdayakan seluruh potensi dan kekuatan nasional sehingga dapat dikerahkan untuk mewujudkan kemampuan yang dapat digunakan dalam upaya pertahanan negara dalam mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat menyentuh kepada aspek-aspek kehidupan nasional. Upaya yang dilaksanakan adalah :

/ a) Komando . . .

## TERBATAS

32

a) Komando Kewilayahan melaksanakan inventarisasi terhadap potensi nasional yang meliputi pendataan keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial lainnya, dilaksanakan untuk menyiapkan data yang akurat agar dapat disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.

b) Pembinaan Geografi. Dalam melakukan pembinaan bidang geografi dengan memberdayakan potensi sumber daya alam oleh Komando Kewilayahan yang berada diwilayahnya bekerjasama dengan pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait guna memperoleh data yang akurat tentang potensi sumber daya alam tersebut, sehingga dari potensi sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan guna kepentingan sistem pertahanan negara antara lain :

(1) Dengan melaksanakan koordinasi dan bekerjasama secara terpadu antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penyiapan daerah pangkal perlawanan sebagai basis pasukan gerilya dalam menyiapkan kekuatan pertahanan guna menghadapi operasi pertahanan wilayah lebih dapat disiapkan secara maksimal.

(2) Demikian juga dengan penyiapan daerah yang mempunyai nilai medan kritik dan rintangan alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghambat kemungkinan gerak maju musuh guna mendukung pelaksanaan pertahanan wilayah dalam rangka operasi pertahanan wilayah lebih terkoordinir sehingga pemanfaatannya lebih efektif.

/ (3) Potensi ...

TERBATAS

## TERBATAS

33

(3) Potensi sumber daya buatan yang terdapat diwilayah betul-betul tertata sesuai dengan fungsi dan kegunaannya agar dapat dioperasionalkan guna mendukung Sistem Pertahanan Negara.

(4) Jenis/macam potensi sumber daya buatan yang ada diwilayah dapat dimanfaatkan dalam mendukung operasional Komando Kewilayahan.

(5) Pemanfaatan sarana jalan yang dapat digunakan sebagai jalan pendekat, jalur komunikasi dan jalur dukungan logistik yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan Pertahanan Negara terutama dalam menyiapkan sarana jalan yang baru yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya yang masih terisolir dapat dibuka, sehingga kepentingan penyiapan basis gerilya lebih efisien. Kerjasama tersebut dapat berbentuk pelaksanaan TMMD skala besar.

c) Pembinaan Demografi. Komando Kewilayahan sesuai dengan tingkatan dan tataran kewenangannya melaksanakan pendataan terhadap potensi sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk disiapkan dan dibina menjadi kekuatan pertahanan negara, sebagai komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk dapat meningkatkan pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan dan kekuatan diharapkan dapat mewujudkan daya tangkal sebagai prioritas yang diperlukan dalam mendukung sistem pertahanan semesta. Langkah yang ditempuh adalah :

/ (1) Apabila . . .

TERBATAS

## TERBATAS

34

(1) Apabila data akurat tentang penduduk dan statusnya dapat diperoleh secara menyeluruh terutama keterlibatan seluruh masyarakat sesuai profesi dalam rangka sistem pertahanan semesta dioptimalkan melalui program sensus penduduk berdasarkan profesi, dan TNI membantu mengumpulkan data terutama di daerah terpencil dan daerah rawan konflik.

(2) Apabila status seseorang dapat dibina sehingga mampu berpartisipasi dalam mendukung pertahanan semesta baik berasal dari karyawan, wiraswasta, mahasiswa, pelajar, organisasi pemuda maupun masyarakat biasa sesuai usia produktif antara 18 tahun sampai dengan 45 tahun.

(3) Dalam pembinaan sumber daya manusia tantangan yang cukup penting pada kondisi saat ini dan masa mendatang adalah sikap dan mental bangsa Indonesia akan nilai-nilai kebangsaan yang cenderung menurun, langkah pembinaan agar lebih meningkatkan kesadaran kebangsaan adalah pemantapan aspek kondisi sosial antara lain mensosialisasikan UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara agar diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya sistem pertahanan negara, sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan pertahanan negara.

d) Pembinaan Sumber Daya Alam. Dengan melakukan pendataan terhadap potensi sumber daya alam yang berada

/ diwilayah . . .

TERBATAS

## TERBATAS

35

diwilayah dengan mengacu kepada kondisi geografi suatu wilayah, yang pada kondisi awalnya sumber daya alam tersebut pemanfaatannya kurang optimal. Guna pemanfaatan sumber daya lebih optimal agar dapat dimobilisasi menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung, maka dalam pendataan serta pelaksanaannya dilakukan pendataan yang akurat tentang potensi sumber daya alam tersebut, sehingga dari data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komando Atas dalam hal ini Panglima TNI maupun Komandan Komando Kewilyahan dan Pemerintah agar potensi sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan guna kepentingan sistem pertahanan negara seperti :

(1) Inventarisasi dan mengevaluasi potensi sumber daya alam yang tersebar diseluruh tanah air.

(2) Mendata kawasan ekosistem sumber daya alam yang rawan terhadap kerusakan dan penjarahan.

(3) Melaksanakan pengkajian - pengkajian tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dapat mensejahterakan masyarakat dan sebagai cadangan kekuatan apabila melaksanakan pertahanan wilayah.

(4) Dihadapkan dengan eskalasi ancaman dapat dipersiapkan sebagai daerah pangkal perlawanan.

e) Pembinaan Ideologi. Ideologi Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia agar terwujudnya ideologi Pancasila sebagai kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi dan menangkal setiap ancaman dan

/ gangguan . . .

TERBATAS

## TERBATAS

36

gangguan dari ideologi lain selain Pancasila. Adapun langkah dan upaya yang dilaksanakan adalah :

(1) Memantapkan kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila.

(2) Menumbuhkan kemampuan untuk menangkal pengaruh ideologi lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

(3) Pancasila harus diamankan dan dilestarikan serta dipertahankan sebagai ideologi bangsa dan negara.

f) Pembinaan Politik. Kegiatan politik agar menjadi kekuatan politik yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan sistem pertahanan negara. Langkah dan upaya yang dilaksanakan adalah :

(1) Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pendidikan politik agar dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

(2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh aliran politik yang bertolak belakang dengan politik yang berlandaskan Pancasila.

g) Pembinaan Ekonomi. Dalam rangka mewujudkan perekonomian secara mandiri sehingga terbentuk kekuatan ekonomi yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, apabila betul-betul dilaksanakan pemberdayaan dan

/ pemanfaatan . . .

TERBATAS

## TERBATAS

37

pemanfaatan dalam meningkatkan daya saing ekonomi dengan mengembangkan dan menggali sumber dana dalam negeri dan memanfaatkan kemajuan teknologi diharapkan mampu mewujudkan ketahanan ekonomi. Langkah dan upaya yang dilaksanakan adalah :

(1) Memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menghadapi dan mengatasi gejolak sosial ekonomi akibat keterpurukan perekonomian nasional.

(2) Membantu Pemerintah Daerah dan mendorong masyarakat dalam mewujudkan perekonomian secara mandiri berdasarkan ekonomi kerakyatan.

(3) Memberikan contoh dan suri tauladan dan mewujudkan kemampuan untuk menghilangkan dan memberantas budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

h) Pembinaan Sosial Budaya. Dalam melakukan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan dengan melaksanakan komunikasi sosial sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk mencintai kebudayaan sendiri sebagai penjabaran dari cinta tanah air dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

(1) Mengajak masyarakat melalui komunikasi sosial untuk memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya cinta tanah air guna mewujudkan kemampuan masyarakat

/ untuk . . .

TERBATAS

untuk menjaga dan memelihara budaya bangsa agar tidak terpengaruh oleh budaya asing.

(3) Kondisi yang diharapkan adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat keinginan untuk memelihara budaya bangsa guna menangkal gejolak sosial yang berakibat kepada kerusuhan sosial.

i) Pembinaan Pertahanan Keamanan. Sebagai sasaran kekuatan pertahanan negara dan terwujudnya seluruh komponen nasional yang meliputi komponen utama didukung dengan komponen cadangan dan komponen pendukung lainnya yang disiapkan untuk menghadapi ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri dengan melaksanakan OMP maupun OMSP sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Adapun upaya yang dilaksanakan adalah :

(1) Memantapkan kemanunggalan TNI – Rakyat melalui pengembangan kemitraan serta melaksanakan Bhakti TNI, pembinaan ketahanan wilayah serta komunikasi sosial sehingga diharapkan terwujud ketahanan nasional melalui kemampuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara.

(2) Mengajak masyarakat berpartisipasi dalam meningkatkan sistem keamanan swakarsa agar mempunyai kemampuan untuk meningkatkan perlawanan rakyat terhadap setiap ancaman yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.

/ (3) Komando . . .

## TERBATAS

39

(3) Komando Kewilayahan bekerjasama dengan pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi dan memberikan penyuluhan pendidikan pendahuluan bela negara yang dilaksanakan secara terprogram sesuai program dari Komando Atas guna tercapainya pemahaman tentang pentingnya bela negara sesuai dengan UU No. 3 tahun 2002 tentang Hanneg.

(4) Program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut dengan metode tatap muka, anjang sana serta kegiatan komunikasi sosial lainnya. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya sendiri serta menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi.

(5) Dalam pelaksanaan sosialisasi dapat memanfaatkan sarana dan prasarana media massa dan elektronik.

2) Kondisi yang diharapkan. Upaya yang dilakukan oleh Komando Kewilayahan untuk meningkatkan pemantapan sistem pertahanan negara guna terwujudnya keutuhan NKRI antara lain dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Bidang Personel. Pada organisasi TNI dalam proses awal kelemahan yang mendasar adalah ketidak seimbangan antara personel yang masuk Komando Kewilayahan dan pemisahan personel Komando Kewilayahan yang akan menghadapi usia pensiun sehingga berakibat kepada berkurangnya personel tersebut dari tahun ketahun terutama kekurangan personel Perwira Pertama, Tamtama dan PNS ditinjau dari segi kuantitas sehingga kekurangan tersebut dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Binter.

/ Upaya . . .

TERBATAS

## TERBATAS

40

Upaya yang dilakukan terutama dalam menginventarisasi personel adalah :

(1) Berapa jumlah personel yang akan menghadapi usia pensiun baik Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS antara tiga tahun, dua tahun dan satu tahun kedepan? Sehingga dari jumlah tersebut pejabat personel sudah dapat mengetahui berapa orang dan berapa persen jumlah personel yang harus diusulkan ulang ke Komando Atas guna mengisi kekurangan tersebut. Dari jumlah dan persentase yang akan memasuki usia pensiun, maka dapat dihitung berapa jumlah jabatan yang kosong yang harus diisi kembali oleh personel baru agar sesuai dengan TOP/DSPP. Maka dari data tersebut pejabat personel sudah dapat memprediksi kuantitas personel yang berada di Komando Kewilayahan.

(2) Secara kualitas agar Personel Komando Kewilayahan dapat melaksanakan pembinaan teritorial secara maksimal maka kualitas personel harus menjadi prioritas utama. Langkah dan upaya yang dilaksanakan adalah dibekali dengan pendidikan dan latihan seluas-luasnya seperti pendidikan Susbater yang harus ditempuh oleh para Babinsa, Suspater oleh para Danramil maupun Pasi Kodim maupun pembekalan bidang teritorial yang dilaksanakan melalui pembinaan dan latihan dalam satuan sehingga diharapkan dengan pembekalan teritorial tersebut akan mampu melakukan tugas-tugas pembinaan teritorial secara maksimal dalam menyiapkan ketahanan wilayah dengan Sistem Pertahanan Negara.

/ b) Motivasi . . .

TERBATAS

## TERBATAS

41

b) Motivasi Kerja. Untuk menumbuhkan motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi bagi Personel Komando Kewilayahan perlu upaya yang harus dilakukan secara intensif dan konsisten oleh setiap Komandan Komando Kewilayahan, namun dalam pelaksanaannya harus cermat dan diawasi secara ketat sehingga diharapkan terwujud motivasi kerja yang tinggi melalui :

(1) Pembinaan Mental. Hal yang terpenting dalam meningkatkan motivasi kerja personel adalah dengan melaksanakan pembinaan mental dimaksudkan agar para personel Kowil memiliki rasa disiplin, tanggung jawab serta wawasan yang luas, demikian juga dengan sikap mental yang baik akan tumbuh rasa percaya diri dari personel Kowil tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam melaksanakan pembinaan mental adalah dengan memberikan Jam Komandan, ceramah, informasi lewat perpustakaan maupun memberikan perhatian pada saat apel. Dan yang lebih penting adalah sebagai pengawasan dengan menggunakan metode memberikan petunjuk, perintah, bimbingan serta memberikan contoh dan tauladan dari unsur pimpinan demikian juga dengan pemberian reward and punishment yang tepat.

(2) Penugasan yang tepat. Kemampuan dan tingkat pengalaman personel Kowil dapat dijadikan dasar dalam penempatan jabatan, namun demikian pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah pada umumnya personel Kowil lebih senang dan tenang apabila ditempatkan disatu wilayah dimana mereka

/ berasal . . .

TERBATAS

## TERBATAS

42

berasal atau penduduk asli daerah tersebut. Hal ini akan berdampak kepada pembinaan lebih lanjut agar mereka tidak berpindah-pindah tempat, sehingga dapat memberikan kemantapan bagi personil tersebut untuk mengenali, menguasai wilayah dan sekaligus dapat diolah untuk kepentingan Sishanneg. Karena dari hasil pengamatan dilapangan ternyata seorang pejabat Babinsa memerlukan waktu yang lama untuk menguasai dan mengenali wilayahnya minimal enam bulan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dalam penempatan personel untuk bertugas diwilayah asalnya sangat positif disatu sisi dapat mengurangi pelanggaran disiplin anggota karena malu apabila melanggar dan berbuat negatif didaerahnya sendiri, Disamping itu masyarakat setempat akan bangga dengan adanya putra daerah yang menjadi prajurit didaerahnya sendiri, sehingga apabila ada kejadian yang menonjol di daerahnya terutama yang diakibatkan oleh gejolak sosial akan mudah dikenali dan diselesaikan secara baik.

c) Komunikasi Sosial. Guna mencapai kondisi yang diharapkan khususnya dalam menjalin komunikasi yang baik antara personel Kowil dengan seluruh komponen masyarakat adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi aparat teritorial itu sendiri. Kemampuan berkomunikasi hanya dapat diperoleh melalui latihan dan kebiasaan yang baik yang diarahkan oleh unsur pimpinan Kowil yang telah berpengalaman. Latihan berkomunikasi dapat dilakukan secara terprogram dengan latihan sesuai dengan kalender latihan dari Komando Atas maupun dapat dilakukan dalam bentuk

/ latihan . . .

TERBATAS

latihan dalam satuan. Adapun teknis pelaksanaannya setiap personel dibiasakan berbicara didepan pasukan untuk mengemukakan pendapatnya, dan selanjutnya secara bertahap didepan masyarakat. Sehingga dengan demikian akan diperoleh komunikasi yang baik antara personel dengan personel dan personel dengan masyarakat sehingga dapat menerima pesan dan menyampaikan pesan guna kepentingan pencapaian tugas.

d) Kesejahteraan Prajurit. Meningkatkan kesejahteraan prajurit merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh unsur pimpinan. Dihadapkan pada tingkat kesejahteraan personel Kowil yang kurang, maka unsur pimpinan harus dapat membaca dan mencari peluang yang ada untuk mendukung kelancaran jalannya organisasi maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kesempatan dan peluang ini cukup terbuka dengan melalui :

(1) Moril personel Kowil akan tumbuh apabila personel Kowil dalam melaksanakan tugasnya mempunyai semangat yang tinggi, hal ini disebabkan adanya motivasi dan dorongan dari unsur pimpinannya dalam melaksanakan tugas dengan pemberian pujian, hadiah bagi personel yang berprestasi sehingga memicu bagi personel lainnya untuk berbuat yang terbaik. Namun sebaliknya bagi personel yang melanggar diberikan sanksi hukum agar timbul rasa jera dan malu untuk mengulang kembali kesalahan tersebut.

/ (2) Rutinitas . . .

(2) Rutinitas dan kegiatan yang monoton akan membuat anggota bosan dan jenuh. Salah satu cara untuk mengurangi kebosanan dan kejenuhan tersebut adalah melaksanakan penyegaran melalui berbagai kegiatan melalui pendidikan dan latihan dalam satuan seperti Permildas dan lain-lain, olah raga bersama, hiburan dan rekreasi dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi disatuan masing-masing.

(3) Pemanfaatan Koperasi. Cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah melalui koperasi, karena jenis usaha tersebut telah disyahkan dan diakui oleh pemerintah sehingga sebagai pimpinan harus dapat mencari peluang untuk memperbesar usaha koperasi tersebut, contoh kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan guna mendapatkan hasil yang optimal. Demikian juga dengan pemberian kredit lunak lewat koperasi atau perbankan dapat membantu anggota untuk mendapatkan modal yang mudah sehingga dapat membangun rumah, membeli tanah pertanian, dan mengembangkan usaha-usaha lain yang dapat mendukung kesejahteraan keluarganya, namun tidak mengganggu tugasnya.

**b. Sistem Pertahanan Negara.** Komando Kewilayahan sesuai dengan tingkatan dan tataran kewenangannya melaksanakan pendataan terhadap potensi sumber daya nasional yang memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk disiapkan dan dibina menjadi

/ kekuatan . . .

## TERBATAS

45

kekuatan pertahanan negara sebagai komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang mantap terlebih dahulu menghimpun data mengenai potensi sumber daya nasional serta melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait lainnya agar potensi sumber daya nasional tersebut lebih disiapkan dan pengoperasiannya dilaksanakan secara terpadu sehingga dapat mendukung kepentingan Hanneg. Langkah yang dilakukan adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait dengan melakukan dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar umat beragama, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.
- 2) Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama ormas, orpol dan LSM untuk membantu meningkatkan pemberdayaan potensi sumber daya nasional yang disiapkan dengan meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dalam rangka perlawanan wilayah.
- 3) Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan tentang pemberdayaan sumber daya nasional dengan menyempurnakan metode pembinaan perlawanan rakyat agar dalam pemanfaatannya dan penggunaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) Dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah menghimpun warga negara Indonesia yang memenuhi kelayakan untuk menjadi pewajib militer diwilayah baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi

/ dengan . . .

TERBATAS

dengan melibatkan Depdagri, Depnaker, Dep PU, Dephub, Pemda/Swasta serta departemen lainnya yang dalam pelaksanaannya diatur dengan undang-undang dengan mengacu kepada UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

5) Komando Kewilayahan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan harus mempunyai kemampuan teritorial dengan baik, kemampuan yang dimiliki tersebut bila dihadapkan kepada tugas pokok TNI yang demikian kompleks belum maksimal, maka setiap aparat teritorial dituntut untuk mempunyai kualitas dan kemampuan teknis yang dapat diandalkan. Hal tersebut dapat dicapai apabila setiap aparat teritorial dilatih secara terencana dan dilaksanakan dengan baik dan benar serta dapat menjawab tantangan yang dihadapi. Adapun untuk dapat memperoleh personel Komando Kewilayahan yang berkualitas adalah dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan wilayah pertahanan perlu upaya meningkatkan bidang intelektual yang bersifat spesialisasi, seperti Susdanrem, Susdandim, Suspater dan Susbabinsa.

**26. Kesimpulan.**

a. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam meningkatkan sistem pertahanan negara sampai saat ini sudah dilaksanakan, namun belum terpadu, terarah dan berkesinambungan serta belum dilengkapi dengan peraturan dan perundang-undangan. Dalam mewujudkan peningkatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang meliputi pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial agar menjadi ruang alat dan kondisi juang yang tangguh dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana serta Piranti Lunak agar menjadi komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung guna kepentingan sistem pertahanan negara.

b. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang dilaksanakan oleh Personel Komando Kewilayahan bila dihadapkan dengan situasi dan kondisi saat ini harus mampu memberikan kontribusi dalam pamantapan Sistem Pertahanan Negara, maka dalam meningkatkan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan guna mencapai sasaran tugas diperlukan personel yang memadai ditinjau dari kuantitas maupun kualitas, motivasi kerja, kemampuan berkomunikasi sosial dan terjaminnya kesejahteraan Personel Komando Kewilayahan tersebut.

c. Komando Kewilayahan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan harus mempunyai kemampuan teritorial dengan baik, kemampuan yang dimiliki tersebut bila dihadapkan kepada tugas pokok TNI yang demikian kompleks belum maksimal, maka setiap aparat teritorial dituntut untuk mempunyai kualitas dan kemampuan teknis yang dapat diandalkan. Hal tersebut dapat dicapai apabila setiap aparat teritorial dilatih secara terencana dan dilaksanakan dengan baik dan benar serta dapat menjawab tantangan yang dihadapi.

/ 25. Saran . . .

**27. Saran.**

a. Dalam rangka mewujudkan RAK Juang yang tangguh guna kepentingan Sistem Pertahanan Negara perlu segera direalisasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah mengenai pemberdayaan komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai penjabaran UU No. 3 Tahun 2002, tentang pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami tentang pentingnya sistem pertahanan negara.

b. Untuk meningkatkan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan perlu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada personel Komando Kewilayahan untuk mengikuti Dikbangspes serta melaksanakan pendidikan dan latihan dalam satuan dengan titik berat pengetahuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sehingga Kowil mampu membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan wilayah pertahanan guna kepentingan pertahanan negara.

c. Perlu ditingkatkan kerjasama antara Satuan Komando Kewilayahan dengan pemerintah daerah serta unsur terkait sehingga dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan wilayah dapat dilaksanakan secara sinergi, sehingga mencerminkan adanya tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan Sistem Pertahanan Negara.

**28. Penutup.** Demikianlah karya tulis ini dibuat, dengan harapan semoga naskah ini bermanfaat bagi TNI, Pemerintah, dan masyarakat.

Medan, Nopember 2009

PENULIS

**HARYANTO.S.IP**

LETKOL INF NRP 1910035810467